

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Teori

##### 1. *Good Corporate Governance*

###### a. Definisi *Good Corporate Governance*

*Forum for Corporate Governance in Indonesia* mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.<sup>18</sup>

*Centre for European Policy Studies* dalam mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai seluruh sistem dari hak-hak (*rights*), proses, dan pengendalian yang dibentuk di dalam dan di luar manajemen secara menyeluruh dengan tujuan untuk melindungi kepentingan stakeholder.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Indrawati, Novita, And Lilla Yulianti. "Mekanisme Corporate Governance Dan Kualitas Laba." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, Vol. 2, No. 02, 2010.

<sup>19</sup> Ana Rita Garcia and others, *What Is Corporate Governance? – Strategic Management (Open Oregon State) 2019*.

*Good Corporate Governance* merupakan suatu sistem yang bertujuan untuk melindungi para investor dari asimetri informasi dan dampak negatifnya. Berdasarkan sudut pandang teori stakeholders, mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu sistem checks and balance baik internal maupun eksternal yang menjamin bahwa Perusahaan melaksanakan akuntabilitas kepada seluruh stakeholders-nya dan bertanggung jawab secara sosial dalam aktivitas bisnisnya. Definisi tersebut diperkuat dan diperjelas oleh Oman dalam penelitian yang dilakukan oleh Rehman, Ali, and Fathyah Hashim. "Impact of fraud risk assessment on *Good Corporate Governance*: Case of public listed companies in Oman." menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* berkaitan dengan institusi public atau privat termasuk hukum, regulasi, dan praktik-praktik bisnis yang bersama-sama mengatur hubungan antara manajer perusahaan di satu pihak dengan pihak lainnya yang melakukan investasi sumber (pemilik dana, kreditur, karyawan, dan pemilik sumber kekayaan lainnya yang berwujud maupun tidak).<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Rehman, Ali, And Fathyah Hashim. "Impact Of Fraud Risk Assessment On *Good Corporate Governance*: Case Of Public Listed Companies In Oman." *Business Systems Research: International Journal Of*

Penerapan GCG bermanfaat untuk mengurangi *agency cost*, yaitu biaya yang harus ditanggung pemegang saham akibat pendelegasian wewenangnya kepada manajemen; menurunkan *cost of capital* sebagai dampak dikelolanya perusahaan secara sehat dan bertanggung jawab; meningkatkan nilai saham perusahaan; serta menciptakan dukungan stakeholders terhadap perusahaan (*license to operate*).

**b. Prinsip Good Corporate Governance**

Elemen dasar dari tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) terdiri dari lima prinsip dasar yang harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan perusahaan, yaitu<sup>21</sup> :

1. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan kebijakan dan mengungkapkan informasi material dan relevan dalam perusahaan. Hal ini dapat tercapai apabila perusahaan dapat menyampaikan informasi yang jelas, memadai, akurat, tepat waktu dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh pihak yang

---

*The Society For Advancing Innovation And Research In Economy* 11.1 (2020): 16-30

<sup>21</sup> Bambang Karsono, 'Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency Dan Fairness (Literature Review)', *Dinasti International Journal of Management Science*, 4.5 (2023), 811–21

berkepentingan sesuai dengan haknya di dalam perusahaan, termasuk diantaranya informasi keuangan atau lainnya yang dapat mendukung kinerja perusahaan.<sup>22</sup> Prinsip keterbukaan ini tentunya tidak mengurangi kewajiban untuk menjaga kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi.

Informasi material dan relevan yang dimaksud di atas antara lain meliputi visi dan misi perusahaan, sasaran dan strategi perusahaan, kebijakan perusahaan yang harus dibuat secara tertulis, kondisi keuangan, susunan kepengurusan, pemilihan sahan yang mungkin saja di dalamnya termasuk anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang berpotensi mempunyai benturan kepentingan, sistem manajemen risiko, sistem pengawasan dan pengendalian internal, sistem dan pelaksanaan GCG serta tingkat kepatuhannya, dan hal-hal lainnya yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.<sup>23</sup> Perusahaan harus memberikan informasi kepada stakeholder yang cukup

---

<sup>22</sup> Rahman.

<sup>23</sup> Riandiani S. Saputri, 'Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Return on Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Pasar Perusahaan (Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei)', 2019.

memadai, akurat dan tepat waktu. Dengan adanya transparansi bisa memudahkan kontrol atas jalannya aktivitas perusahaan, karena dalam prinsip ini informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas.

## 2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.<sup>24</sup> Prinsip ini memuat kewenangan-kewenangan yang harus dimiliki oleh dewan komisaris dan direksi beserta kewajiban-kewajibannya kepada pemegang saham dan stakeholders lainnya. Dewan direksi bertanggung jawab atas keberhasilan pengelolaan perusahaan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham. Komisaris bertanggung jawab atas keberhasilan pengawasan dan wajib memberikan nasehat kepada direksi atas pengelolaan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Pemegang saham

---

<sup>24</sup> Bulan Juni, Afhani Fizi, and Monica Rahardian Ary Helmina, 'Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) Pada Perusahaan', *Surplus: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1 (2023), 379–87.

bertanggung jawab atas keberhasilan pembinaan dalam rangka pengelolaan perusahaan.

### 3. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan yaitu kepastian dalam hal sistem hukum dan penegakan hukum yang dapat memberikan perlindungan bagi hak-hak investor atau pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya dari berbagai kejahatan atau kecurangan dalam perusahaan.<sup>25</sup> Selain itu, perusahaan juga harus membuka kesempatan pada pihak-pihak yang berkepentingan untuk memberikan informasi, masukan dan pendapat demi kepentingan perusahaan, dan memberikan perlakuan yang setara dan wajar sesuai dengan manfaat dan kontribusi yang diberikan kepada perusahaan, serta harus memberikan kesempatan yang sama dalam penerimaan karyawan, berkarir, dan melaksanakan tugasnya secara profesional. Prinsip ini tidak membedakan antara pemegang saham satu dengan lainnya, semua dianggap sama hak dan kewajibannya. Untuk itu diperlukan aturan dan penerapan sistem peraturan

---

<sup>25</sup> Aten, Nurul, Romi Adetio Setiawan, And Miko Polindi. "Analisis Implementasi GCG dan Fungsi DPS Sebagai Internal Auditor Di Bank Muamalat Indonesia." *Jurnal Tabarru': Islamic Banking And Finance* 7.2 (2024): 586-594.

yang melindungi hak-hak yang dimiliki pemegang saham.

#### 4. Responsibilitas (*Responsibility*)

Kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan Perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan yang berlaku. Prinsip ini menekankan pada adanya sistem yang jelas untuk mengatur mekanisme pertanggung jawaban perusahaan kepada pemegang saham dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Hal tersebut untuk merealisasikan tujuan yang hendak dicapai dalam *Good Corporate Governance* yaitu mengakomodasikan kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan seperti masyarakat, pemerintah, asosiasi bisnis dan sebagainya.<sup>26</sup> Prinsip ini menuntut perusahaan maupun pimpinan dan manajer perusahaan melakukan kegiatannya secara bertanggung jawab.

#### 5. Kemandirian (*Independency*)

Kemandirian yaitu keadaan dimana suatu perusahaan dijalankan secara profesional dan dapat berdiri sendiri tanpa adanya benturan kepentingan

---

<sup>26</sup> OECD, 'Principles of Corporate Governance. Disampaikan Melalui Hukumonline - Menekankan Elemen Kerangka Kerja Efektif, Hak Pemegang Saham, Transparansi, Dan Tanggung Jawab Dewan', *G20/OECD*, 2023 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-igood-corporate-governance-i-sebagai-budaya-perusahaan> (Akses 14 Desember 2024).

dan pengaruh dari pihak lain. Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. Dalam pelaksanaannya, perusahaan harus dapat menghindari dari adanya dominasi atau intervensi dari pihak manapun, tidak terpengaruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan kepentingan dan dari segala pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan secara objektif.<sup>27</sup> Selain itu, organ perusahaan juga harus dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak saling melempar tanggung jawab antara satu dengan yang lainnya sehingga terwujud sistem pengendalian internal yang efektif.

### **c. Penilaian *Good Corporate Governance***

IICG menggunakan indeks sebagai dasar untuk penilaian *Good Corporate Governance*. Indeks tersebut merupakan satu-satunya indeks yang

---

<sup>27</sup> Fairuz Zahrah, 'Pengaruh *Good Corporate Governance*, *Profitabilitas* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Perusahaan IDX-30 Di Bursa Efek Indonesia Periode 2019 - 2022)', 2023

dipublikasikan dari hasil penelitian pada perusahaan di Indonesia dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia.<sup>28</sup>

Komponen indeks tersebut adalah prinsip-prinsip *Corporate Governance* yaitu transparansi, akuntabilitas, keadilan, tanggung jawab, dan kemandirian. Prinsip tersebut telah dijabarkan sesuai 7 bagian yaitu komitmen terhadap *Corporate Governance*, hak pemegang saham, tata kelola dewan komisaris, struktur direksi, pelaksanaan RUPS dan perlakuan terhadap pemegang saham minoritas, hubungan terhadap stakeholder, transparansi dan akuntabilitas

#### **d. Manfaat *Good Corporate Governance***

Penerapan *Good Corporate Governance* memiliki beberapa manfaat baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, antara lain sebagai berikut<sup>29</sup> :

1. Dapat meningkatkan nilai saham perusahaan dan meningkatkan citra perusahaan.

---

<sup>28</sup> Hisky Ryan Kawulur And Demar Kala, 'Pengaruh *Good Corporate Governance* Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan', *Jurnal Akuntansi Manado (Jaim)*, 2024, 237–49

<sup>29</sup> Wahyu Gusriandari, Mega Rahmi, And Yosep Eka Putra, 'Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2020', *Jurnal Pundi*, 6.1 (2022), 181–96

2. Dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan pemegang saham sehubungan dengan adanya pelimpahan wewenang kepada manajemen untuk menjalankan perusahaan.
3. Dapat menekan biaya modal perusahaan, dimana sebagai hasil dari pengelolaan perusahaan yang baik adalah menurunnya risiko perusahaan, sehingga menyebabkan menurunnya dana yang dibutuhkan atau dipinjam oleh perusahaan.
4. Dapat meningkatkan dukungan dari para pemegang saham terhadap berbagai strategi dan kebijakan dari perusahaan yang dinilai lebih terjamin akan bermanfaat maksimal bagi perusahaan.

**e. Pengukuran *Good Corporate Governance***

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dianggap berkontribusi pada peningkatan kinerja finansial perusahaan. GCG terbangun atas dua kerangka mekanisme, yakni internal dan eksternal. Mekanisme internal meliputi keberadaan komisaris independen serta komite audit yang berfungsi sebagai pengendali tata kelola. Riset ini menggunakan GCG yang direpresentasikan melalui indikator mekanisme internal, dengan fokus pada pengaruh komisaris independen dan komite audit.

## 1. Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.<sup>30</sup>

Komisaris independen dihitung dengan menghitung persentase dari anggota dewan komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan terhadap total ukuran dewan komisaris perusahaan. Rumus menghitung komisaris independen adalah sebagai berikut:

$$\text{KI} = \text{DK Ekstern} / \text{DK} \times 100\%$$

Keterangan:

KI : Proporsi dewan komisaris independen

DK Ekstern : Total anggota dewan komisaris yang berasal dari ekstern perusahaan

DK : Dewan komisaris

---

<sup>30</sup> Elizabet Desi Astuti and Saring Suhendro.

## 2. Komite Audit

Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *Corporate Governance* di perusahaan-perusahaan. Perusahaan publik wajib membentuk komite audit yang bekerja secara kolektif dan berfungsi untuk membantu dewan komisaris dan dewan pengawas dalam melaksanakan tugasnya.<sup>31</sup>

Komite audit minimal memiliki 3 orang anggota yang terdiri dari ketua komite audit dan 2 orang anggota yang merupakan pihak eksternal yang independen. Dalam penelitian ini menggunakan jumlah anggota komite audit sebagai proksi dari komite audit. Jumlah anggota komite audit digunakan untuk mengukur efektivitas komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

---

<sup>31</sup> Stevi Jimry Poluan And Arya Aditya Wicaksono, 'Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017', *Jim Upb (Jurnal Ilmiah Manajemen Universitas Putera Batam)*, 7.2 (2019), 228–37

Rumus komite audit adalah sebagai berikut:

$$\text{Komite Audit} = \sum \text{Komite audit}$$

#### f. Struktur kepemilikan

Struktur kepemilikan bisnis meliputi kepemilikan institusional serta kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial adalah bagian dari saham perusahaan yang dimiliki oleh manajer yang juga pemegang saham dalam bisnis. Manajemen akan memaksimalkan kinerja perusahaan semaksimal mungkin. Kepemilikan institusional yang signifikan menunjukkan bahwa manajer dapat mengawasi bagaimana sumber daya perusahaan digunakan. Struktur kepemilikan berdampak pada kinerja keuangan, sesuai dengan deskripsi.<sup>32</sup>

Kepemilikan institusional dan kepemilikan manajemen membentuk struktur kepemilikan. Keadaan dimana manajer memiliki saham perusahaan, atau dengan kata lain manajer juga merupakan pemegang saham perusahaan, itulah yang dimaksud dengan kepemilikan manajerial. Rasio

---

<sup>32</sup> Adjani, M. G. D. A., & Parinduri, A. Z. (2022). Pengaruh struktur modal, profitabilitas, ukuran perusahaan, dan struktur kepemilikan terhadap nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 1447-1458.

jumlah saham yang dimiliki oleh manajer atau direksi dengan jumlah saham yang beredar digunakan untuk menghitung kepemilikan manajerial.<sup>33</sup>

Saham yang dimiliki oleh pemerintah, lembaga keuangan, badan hukum, lembaga asing, dana perwalian, dan lembaga lain pada akhir tahun disebut sebagai kepemilikan institusional. Sebaliknya, kepemilikan institusional dihitung sebagai jumlah saham yang beredar dibagi dengan jumlah saham yang dimiliki institusi.

### **1. Pengertian Struktur Kepemilikan**

Jenis organisasi atau perusahaan yang memiliki saham mayoritas dalam suatu perusahaan disebut Struktur Kepemilikan. Investor individu, pemerintah, dan institusi perusahaan semuanya dapat menjadi bagian dari struktur kepemilikan. Ada banyak jenis kepemilikan di perusahaan. Institusi domestik, institusi internasional, pemerintah, pegawai, dan individu domestik semuanya termasuk dalam kategori struktur kepemilikan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Anggraini and Fidiana.

<sup>34</sup> Zahra, A. A. Pengaruh Struktur Kepemilikan, Struktur Dewan Komisaris, Dan Ukuran Direksi Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Non-Keuangan Yang Terdaftar Dalam Indeks Kompas 100 Tahun 2020 Dan 2021).

Tujuan yang berbeda akan mendorong pemantauan struktur kepemilikan perusahaan, manajemennya, dan dewan direksinya. Struktur kepemilikan dikatakan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi bagaimana perusahaan dijalankan, yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan. Struktur kepemilikan dapat membantu mengurangi kesulitan agensi. Struktur kepemilikan merupakan mekanisme untuk mengurangi gesekan antara manajemen dan pemegang saham. Kepemilikan manajerial dan institusional adalah dua teknik tata kelola perusahaan yang dapat digunakan untuk mengendalikan masalah keagenan.

## **2. Pengukuran Struktur Kepemilikan**

### **a. Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial diartikan sebagai bagian atas saham yang menunjukkan kepemilikan oleh manajemen atas total keseluruhan saham perusahaan. Pihak manajemen adalah pihak yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan terhadap perusahaan, seperti direktur, dewan komisaris, karyawan, manajer, atau pihak berkepentingan lain yang terlibat.

Adanya kepemilikan saham oleh manajemen secara tidak langsung membuat manajemen berusaha untuk membuat kinerjanya sebaik mungkin untuk mencapai tujuannya, baik sebagai pribadi atau individu maupun sebagai investor, dan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan keuangan.<sup>35</sup>

Kepemilikan manajerial merupakan total kepemilikan saham dari pemilik, dewan eksekutif, dan manajemen terhadap suatu perusahaan. Persentase dari kepemilikan manajerial bisa diukur melalui perhitungan kepemilikan manajerial yakni sebagai berikut:

$$\text{KM} = \text{SM} / \text{SB} \times 100\%$$

Keterangan:

KM : Kepemilikan manajerial

SM : Total saham yang dipunya oleh manajemen

SB : Jumlah saham dari perusahaan yang dikelola

---

<sup>35</sup> Tariq H. Ismail, Mohamed Samy El-Deeb, and Raghda H. Abd El-Hafiezz, 'Ownership Structure and Financial Reporting Integrity: The Moderating Role of Earnings Quality in Egyptian Practice', *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 6.5 (2024), 471–95 <<https://doi.org/10.1108/jhass-06-2024-0076>>.

## **b. Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional adalah bagian saham yang menunjukkan kepemilikan oleh investor institusional atas total saham perusahaan. Institusi yang dimaksud adalah perusahaan asuransi, perusahaan investasi, bank, dan perusahaan lainnya yang akan melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen.<sup>36</sup>

Investor institusional merupakan perusahaan yang memiliki sumber daya yang lebih besar jika dibandingkan dengan investor individu sehingga kekuatan untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja manajemen menjadi lebih besar. Pengawasan dari investor institusional ini sangat diperlukan oleh perusahaan agar kinerja manajemen dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan berjalan sebagaimana mestinya.

Kepemilikan institusional diukur sesuai persentase kepemilikan saham oleh institusi perusahaan. Rumus untuk menghitung

---

<sup>36</sup> Astuti, E. D., & Suhendro, S. (2024). Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Kinerja Keuangan Sebagai Variabel Mediasi:(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021). *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 2(1), 340-356.

persentase kepemilikan institusional adalah sebagai berikut:

$$\text{KI} = \text{SI} / \text{SB} \times 100\%$$

Keterangan:

KI: Kepemilikan Institusional

SI: Jumlah Saham Institusional

SB: Jumlah Saham Beredar

## 2. Return On Assets

### a. Definisi Return On Assets

Return On Assets (ROA) merupakan aktiva suatu perusahaan dan salah satu rasio profitabilitas. Dalam analisis laporan keuangan, rasio ini paling sering disoroti, karena mampu menunjukkan keberhasilan Perusahaan menghasilkan keuntungan, sehingga aktiva tersebut akan menjadi modal kerja bagi perusahaan dalam melakukan usahanya. Sedangkan hasil usaha perusahaan dinyatakan dalam bentuk laba bersih atau NetIncome After Tax (NIAT).<sup>37</sup> Dengan demikian rasio antara Net Income After Tax terhadap asset secara keseluruhan akan

---

<sup>37</sup> Riandiani S. Saputri, 'Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* Return On Asset Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Pasar Perusahaan (Kasus Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei)', 2019.

menunjukkan ukuran produktivitas aktiva dalam memberikan pengembalian kepada penanam modal.

Rumus untuk menghitung ROA

$$\text{ROA} = \text{Net Income} / \text{Total Asset} \times 100\%$$

Net Income = Pendapatan Perusahaan di kurang biaya

Total Asset = Harta yang dimiliki perusahaan

#### **b. Keunggulan Return On Assets**

Keunggulan Return On Assets (ROA) adalah sebagai berikut<sup>38</sup> :

1. ROA merupakan pengukuran yang komprehensif dimana seluruhnya mempengaruhi laporan keuangan yang tercermin dari rasio ini.
2. ROA mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut.
3. ROA merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha.

---

<sup>38</sup> Purwanto, Purwanto, And Nanda Fito Mela. "Pengaruh Modal Intelektual Dan Keunggulan Bersaing Terhadap Kinerja Keuangan." *Current 2.2* (2021): 339-362.

### c. Kelemahan *Return On Assets*

Kelemahan *Return On Assets* (ROA) adalah sebagai berikut<sup>39</sup> :

1. Pihak manajemen yang lebih terfokus terhadap tujuan jangka pendek bukan tujuan jangka panjang perusahaan.
2. Sebuah project dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi memiliki konsekuensi negatif untuk jangka panjang yang berupa pemutusan beberapa tenaga penjualan pengurangan budget pemasaran dan penggunaan bahan baku yang lebih murah sehingga menurunkan kualitas dalam jangka panjang.

### 3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan total aktiva, log size, nilai pasar saham, jumlah penjualan, rata-rata total penjualan dan rata-rata total aktiva. Keputusan ketua Bapepam No. Kep11/PM/1997 menyebutkan perusahaan kecil dan menengah berdasarkan aktiva (kekayaan) adalah

---

<sup>39</sup>Ningrum, Shella Ambar. "Pengaruh *Tax Avoidance* Dan *Leverage* Terhadap *Return On Assets* (Roa) Pada Perusahaan Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Periode 2015–2019." *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Entitas* 3.1 (2023): 71-89.

badan hukum yang memiliki total aktiva tidak lebih dari seratus milyar rupiah, sedangkan perusahaan besar adalah badan hukum yang total aktiva di atas seratus milyar.<sup>40</sup>

Berdasarkan Undang-undang No. 9 Tahun 1995, ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga, yaitu <sup>41</sup> :

a. Perusahaan Kecil

Perusahaan kecil yang dimaksudkan di sini adalah suatu perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta rupiah tidak termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan minimal 1 milyar rupiah/tahun.

b. Perusahaan Menengah

Perusahaan menengah yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih antara 1 milyar sampai 10 milyar rupiah termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan lebih besar dari 1 milyar rupiah dan kurang dari 50 milyar rupiah.

c. Perusahaan Besar

Perusahaan besar yang dimaksud adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih lebih dari

---

<sup>40</sup> Ratih, Hartiana. *Pengaruh Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Maqashid Syariah Index Terhadap Nilai Perusahaan (Pada Bank Umum Syariah Periode 2016-2020)*. Diss. Uin Raden Intan Lampung, 2022.

<sup>41</sup> Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil', *Undang-Undang RI*, 1995, 1–29 <<https://bphn.go.id/data/documents/95uu009.pdf>>.

10 milyar termasuk bangunan dan tanah, memiliki hasil penjualan lebih dari 50 milyar rupiah/tahun.

Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah bertambah dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan aset yang kecil.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini akan digunakan total aktiva untuk mengukur ukuran perusahaan karena nilai aktiva relatif lebih stabil dibandingkan penjualan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dapat dilihat dari besar kecilnya total aktiva yang dimiliki. Jadi salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah total aktiva dari perusahaan tersebut. Total aktiva adalah segala sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan sebagai akibat dari transaksi masa lalu

---

<sup>42</sup> Saputri, C. K., & Giovanni, A. (2021). Pengaruh *profitabilitas*, pertumbuhan perusahaan dan likuiditas terhadap nilai perusahaan. *Competence: Journal of Management Studies*, 15(1), 90-108.

dan diharapkan akan memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan di masa yang akan datang.<sup>43</sup>

Rumus untuk menghitung Total Aktiva :

**Total Aktiva = Aset Lancar + Aset Tetap (Penyusutan)**

*atau*

**Total Aset = Total Kewajiban + Ekuitas Pemegang Saham**

Ukuran perusahaan yang sebenarnya menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan memanfaatkan peluang bisnis. Perusahaan yang kokoh dan besar harus bisa memanfaatkan peluang bisnis yang ada dan menjaga kestabilan pengelolaan dana dalam perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan.

Perusahaan yang memiliki total aktiva dengan jumlah besar atau disebut dengan perusahaan besar akan lebih banyak mendapatkan perhatian dari investor, kreditor maupun para pemakai informasi keuangan lainnya dibandingkan dengan perusahaan kecil. Jika perusahaan memiliki total aktiva yang besar maka pihak manajemen akan lebih leluasa dalam menggunakan aktiva yang ada di perusahaan

---

<sup>43</sup> Devy Tania Nabila, 'Perusahaan Terhadap Struktur Modal', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 12 (2023), 1–15.

tersebut.<sup>44</sup> Kemudahan dalam mengendalikan aktiva perusahaan inilah yang akan meningkatkan nilai perusahaan. Dalam menghadapi guncangan ekonomi, biasanya yang lebih kokoh berdiri adalah perusahaan yang berukuran besar, meskipun tidak menutup kemungkinan dialaminya kebangkrutan, sehingga investor akan lebih cenderung menyukai perusahaan berukuran besar daripada Perusahaan kecil.

Perusahaan yang besar relatif mudah akses ke pasar modal. Kemudahan ini mengindikasikan bahwa perusahaan besar relatif mudah memenuhi sumber dana dari hutang melalui pasar modal. Semakin besar perusahaan maka semakin banyak dana yang digunakan untuk menjalankan operasi perusahaan. Salah satu sumber untuk memperoleh dana adalah melalui hutang di pasar modal.

#### **4. Nilai Perusahaan**

Tujuan keuangan adalah untuk memaksimalkan nilai perusahaan, jika nilai perusahaan semakin tinggi maka semakin sejahtera pemilik perusahaan. nilai perusahaan mencerminkan nilai asset (aktiva) yang dimiliki oleh

---

<sup>44</sup> Poluan and Wicaksono. 'Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance* Terhadap Nilai Perusahaan Pada Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017', *Jurnal Ilmiah Manajemen Ump* Vol No.2 2019

perusahaan, nilai perusahaan juga disebut nilai pasar.<sup>45</sup> Tujuan utama nilai perusahaan meningkatkan kemakmuran pemilik atau pemegang saham yaitu melalui meningkatkan nilai perusahaan. harga saham yang tinggi mencerminkan nilai perusahaan juga tinggi.

Harga saham merupakan harga yang terjadi pada saat saham diperdagangkan di pasar. Tumbuhnya nilai perusahaan tergantung pada peluang kemampuan untuk menarik modal. Nilai suatu asset juga bergantung pada likuiditas yang artinya seberapa mudah asset itu dijual dan diubah menjadi kas pada “nilai pasar yang wajar”.

Pengukuran nilai perusahaan menggunakan Rasio Tobin's Q dipilih sebagai rasio yang akan memberikan gambaran nilai perusahaan sebagai bentuk dari nilai kombinasi anatar asset berwujud dan asset tiak berwujud. Jika nilai Tobin's Q semakin besar, maka prospek pertumbuhan perusahaan dinilai semakin baik.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Pengetahuan Perpajakan and Terhadap Kepatuhan, ‘Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (Stie Indonesia) Banjarmasin Program Studi Akuntansi 2022.

<sup>46</sup>Ahnan Aditya Lutfi and Bagus Panuntun, ‘Analisis Pengaruh Rasio Profitabilitas ROA, ROE, Dan NPM Terhadap Nilai Perusahaan Yang Tercatat Dalam IDX-MES BUMN’, *Selekta Manajemen: Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 03.01 (2024), 81–91.

Nilai Perusahaan dapat diukur dengan rumus Tobin's Q adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

$$\text{Tobin's Q} = \frac{\text{Nilai Pasar Equitas} + \text{Total Utang}}{\text{Total Aktiva}}$$

## B. Kerangka Berpikir penelitian

Tabel diagram yang menggambarkan hubungan antar variabel :

**Tabel 2. 1**  
**Kerangka berpikir penelitian**

Variabel Independen	Variabel Dependen	Keterangan Hubungan
<i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	Nilai Perusahaan	GCG dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung melalui ROA terhadap nilai perusahaan.
<i>Return on Asset</i> (ROA)	Nilai Perusahaan	ROA dapat berpengaruh langsung maupun tidak langsung nilai perusahaan.
Ukuran Perusahaan ( <i>Size</i> )	Nilai Perusahaan	Ukuran perusahaan (misal: total aset) berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

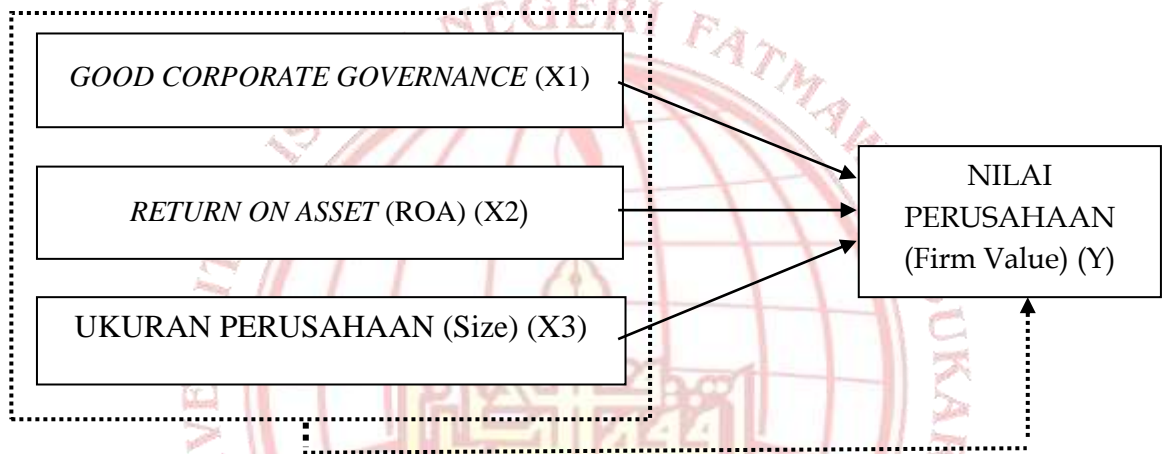
Pada Tabel 2.1 dapat dijelaskan hubungan antara variabel independen (*Good Corporate Governance*, *Return on Asset*, dan *Ukuran Perusahaan*) dengan variabel dependen (*Nilai Perusahaan*), serta peran potensial Variabel

<sup>47</sup>Susesti and Wahyuningtyas.

Independen terhadap variabel dependen dalam penelitian pada perusahaan asuransi syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

**Gambar 2. 1**

**Diagram Kerangka Berpikir Penelitian**



Gambar 2.1 adalah Ilustrasi visual hubungan antara variabel independen (*Good Corporate Governance*, *Return on Asset*, dan *Ukuran Perusahaan*) terhadap variabel dependen (*Nilai Perusahaan*).

### **C. Hipotesis Penelitian**

Hipotesis adalah tanggapan sementara terhadap rumusan masalah penelitian, karena tanggapan tersebut didasarkan pada teori yang tidak ada bukti yang mendukung logika berpikir dan relevansi fakta-fakta yang bersifat empiris.

Dalam konteks penelitian mengenai pengaruh penerapan *Good Corporate Governance*, *Return on Asset*, dan Ukuran Perusahaan terhadap nilai perusahaan, hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1 : Penerapan *Good Corporate Governance* berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan.

H2 : *Return on Asset* berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan.

H3 : Ukuran perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan.

H4 : Penerapan *Good Corporate Governance*, *Return On Assets* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap nilai perusahaan.

